

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN ZONA INTEGRITAS



Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 51 Muaro
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,
Sumatera Barat 27511

PENGADILAN NEGERI MUARO



pengadilannegerimuaro



pengadilannegerimuaro



pengadilannegerimuaro



www.pn-muaro.go.id



PENGADILAN NEGERI MUARO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

NOMOR : W3.U14/ **1a** /SK/KPN/1/2022

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MUARO

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Muaro perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MUARO

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Tambahan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muaro, untuk menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Predikat WBBM dan WBM serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Muaro.



- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Muaro agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sijunjung
Pada Tanggal 03 Januari 2022



Ketua Pengadilan Negeri Muaro

SUBRANTO, SH. MH

NIP. 197907132001121003



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN NEGERI MUARO

Tahun 2022

No.	Kinerja Tambahan	Indikator Kinerja	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1.	Pengendalian Gratifikasi	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Menetapkan SK Tim Pengendalian Gratifikasi, Menyusun SOP, Memasang Poster Tentang Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Muaro, Mensosialisasikan Gratifikasi via website	SK Tim Pengendalian Gratifikasi, SOP, Laporan, Spanduk, Banner, Foto	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Laporan Tim Pengendalian Gratifikasi setiap sebulan sekali dan pelaporan juga disampaikan di website PN Muaro, Menyusun rencana aksi atas hasil	Laporan Tim Pengendalian Gratifikasi baik berupa Hard Copy maupun melalui Website PN Muaro	Ketua Pengadilan Negeri Muaro



			pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi		
2.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan Pengadilan Negeri Muaro	Menyusun dokumen SPIP, Menetapkan Tim SPIP, menggunakan WA grup sebagai media pengendalian internal	SK Tim SPIP, Rapt Bulanan	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai	Undangan Sosialisasi, Daftar Hadir, Notulen, Foto-foto kegiatan	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan	Menyusun pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat yang telah dibuat dan dikoordinasikan antar pejabat terkait mekanisme, tata kerja dan prosedur penanganan	Prosedur Pengaduan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI, SK Tim Pengaduan Masyarakat dari Ketua Pengadilan Negeri Muaro	Ketua Pengadilan Negeri Muaro



			pengaduan masyarakat		
		Hasil Penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menyusun Laporan Tindak lanjut Pengaduan Setiap sebulan sekali	Laporan Pengaduan per bulan, Menampilkan laporan pengaduan via website	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester	Laporan Monev atas penanganan pengaduan masyarakat	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
4.	Whistle Blowing System (WBS)	<i>Whistleblowing System</i> sudah diinternalisasikan	Membuat pedoman pelaksanaan Whistleblower di lingkungan Pengadilan Negeri Muaro, Menetapkan SK Pengelola Whistleblowing	Dokumen/Kebijakan WBS, SK pengelola WBS, Undangan, Daftar hadir, Notulen, Foto-foto Kegiatan, dan publikasi di Website	Ketua Pengadilan Negeri Muaro



			System oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro, Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistleblowing system		
		Evaluasi atas penerapan WBS sudah dilakukan	Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS, Menyusu program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
		Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti	Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
5.	Peningkatan Pelayan Publik	Kebijakan Pelayanan Publik telah diimplementasikan	Menyusun pedoman Peningkatan Pelayanan Publik	Prosedur Pelayanan Publik, Foto Sarana Pelayanan Publik	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
6.	Penetapan Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan Standar Pelayanan	Menyusun Standar Pelayanan, Menetapkan Tim	Sk Penetapan Standar Pelayanan, Inovasi, SOP Pelayanan Untuk	Ketua Pengadilan Negeri Muaro



			SIPP	Difabel	
		Standar Pelayanan telah di maklumatkan	Menyusun Maklumat Pelayanan, Mensosialisasikan Maklumat Pelayanan via Website	Maklumat Satndar Pelayanan, Inovasi, Maklumat tercantum di website	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
		Terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan	SOP tersedia di ruang pelayanan	SOP di ruang pelayanan	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
7.	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja melalui arahan Ketua Pengadilan Negeri Muaro pada Rapat, Apel	Daftar hadir, Notulen, Foto Kegiatan	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
8.	Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat	Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat melalui IKM per semester	Laporan IKM	Ketua Pengadilan Negeri Muaro
		Hasil Suveri kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan masyarakat pada IKM di website	Screenshot dari website	Ketua Pengadilan Negeri Muaro



			Pengadilan Negeri Muaro		
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil IKM	Analisis IKM dan tindak lanjutnya	Ketua Pengadilan Negeri Muaro

Sijunjung, 03 Januari 2022



Ketua Pengadilan Negeri Muaro

Subronto

SUBRANTO, SH. MH

NIP. 197907132001121003

